

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah jika dikelola dengan baik seharusnya dapat membantu menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat dengan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan seefisien mungkin. tanpa guna potensi yang maksimal, pembangunan nasional dapat dicapai sebagai berikut: terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi semua pertumpahan darah bangsa dan seluruh Indonesia, mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Menurut data Badan Pusat statistika dengan berbagai sumber penerimaan keuangan negara total pendapatan negara pada tahun 2019 berjumlah Rp. 1960633.60 Milyar kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu berjumlah Rp. 1699948.50 Milyar kemudian pada tahun 2021 jumlahnya mengalami kenaikan yaitu sejumlah Rp. 1743648.50 Milyar. Berdasarkan sumber tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah.² Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional pemerintah pusat dan daerah juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah pusat memberlakukan desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan penuh pada interior mewujudkan daerah otonom yang bertanggung jawab mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensinya dimiliki oleh daerah.

Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri perihal pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai otonomi daerahnya masing-masing hal ini tertuang dalam

¹ L Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 37.

² Statistika Badan Pusat, "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021," Government, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/Realisasi-Pendapatan-Negara.Html>, 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah.³ Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola penerimaan dan pengelolaan daerah dengan baik dan mandiri. Sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lainnya yang sah. Desentralisasi ini sebagai bentuk upaya pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam mengurus kepentingannya sendiri. Usaha peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari sudut pandang lebih luas sebagai upaya untuk memperoleh tambahan dana yang digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran daerah tersebut.⁴

Industri pariwisata memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya kontribusi sektor pariwisata terhadap perkembangan PDB nasional dan adanya daya serap yang tinggi dalam pengurangan angka pengangguran di Indonesia. Bukan hanya pada sektor ekonomi saja pariwisata juga memberikan dampak positif bagi sektor budaya dan sosial. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan akan sangat berpengaruh terhadap perannya membantu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Sumber daya alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Provinsi Jawa barat memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang mencapai 22,10% dari luas Jawa Barat.⁵ Sumber daya alam yang luas ini memiliki potensi yang luar biasa untuk pengembangan wisata. Mengingat sektor

³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.

⁴ Santika and Jasman, "Pengaruh Produk Dan Bauran Promosi Wisata Terhadap Citra Destinasi Dan Dampaknya Pada Minat Wisatawan Untuk Melakukan Kunjungan Ulang Ke Prov. Aceh.," *Jurnal Magister Manajemen Unsyiah* 3 No. 1 (2014): 58.

⁵ Jawa Barat Pemerintah Provinsi, "Jumlah Kecamatan Dan Klasifikasi Perkotaan/Pedesaan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," last modified 2017, <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1263>.

pariwisata merupakan salah satu sektor jasa yang sangat penting untuk dikembangkan. Sumber-sumber tersebut dihasilkan dari pajak, retribusi pariwisata dan pendapatan lain-lain akan sangat membantu penerimaan pendapatan asli daerah.

Provinsi Jawa Barat memiliki banyak obyek wisata yang sangat menarik Green Canyon (Pangandaran), Taman Sakura (Kebun Raya Cibodas), Stone Garden (Padalarang), Kawah Putih (Bandung), Gunung Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi. Masing-masing lokasi wisata memiliki pesonanya sendiri yang mampu mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara. Tentunya hal ini dapat membantu pendapatan asli daerah seperti yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1.
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2021.⁶

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2020		
No.	Tahun	Pendapatan (Rupiah)
1	2019	Rp. 3.303.376.211.046
2	2020	Rp. 97.710.025.495
3	2021	Rp. 191.611.626.106

Sumber: Open Data Jawa Barat yang diolah

Pada tabel diatas menunjukkan pendapatan asli daerah jawa Barat dari tahun 2019 hingga 2021 yang mengalami jumlah tak signifikan hal ini dikarenakan pada tahun 2020 virus Covid-19 yang melanda Indonesia. Dampak virus ini tak hanya mengancam pada sketor kesehatan saja melainkan pada sektor keuangan, sektor, perindustrian, sektor pendidikan, dan sektor perkantoran. Himbauan pemerintah mengenai bekerja, belajar dan beribadah di rumah sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 membuat sebagian besar masyarakat harus menghentikan dan mengubah aktivitasnya menjadi dirumah.

⁶ Jawa Barat Satu Data, "Jumlah Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat," Government, last modified 2021, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-pendapatan-asli-daerah-di-jawa-barat>.

Dalam Tabel 1.1. pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup rendah yaitu yang terdiri adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Pariwisata pada dasarnya merupakan merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalan bagi wisatawan.⁷

Selain peran dari pemerintah juga terdapat wisatawan yang membantu menambahkan jumlah pendapatan asli daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Wisatawan ini sebagai *central* atau pusat berjalannya berbagai roda kepariwisataan. Tanpa wisatawan obyek wisata akan sepi, akomodasi hotel dan transportasi pun akan berhenti beroperasi apalagi restoran yang berada di lokasi wisata maupun jauh dari tempat wisata namun menjadi ikon suatu daerah juga akan terhambat sirkulasi perputaran ekonominya. Maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah juga akan berkurang karena pajak dari sektor ini juga berkurang. peran penduduk yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata dan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Meski terdapat pendapatan lain selain dari sektor pariwisata yaitu sektor pajak yang mengandalkan jumlah sumber daya alam dan sumber daya manusia namun tetap saja sektor pariwisata ini memberikan jumlah yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sumber daya manusia pada angka yang tinggi diiringi oleh perubahan teknologi akan mendorong pendapatan dan penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Jumlah penduduk yang bertambah dibutuhkan dan sebagai unsur yang dapat memacu pembangunan serta pertumbuhan ekonomi namun dengan penduduk yang produktif.

⁷ Andri Warman Muljadi, *Kepariwisataan Dan Perjalanan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 15.

Besarnya pendapatan di suatu negara atau daerah dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik juga akan meningkat.

Kegiatan mengembangkan potensi obyek wisata dan daya wisata serta kawasan-kawasan wisata potensial secara berkelanjutan dan kegiatan yang memiliki beberapa dimensi pada proses pembangunan. Selain dari pengertian di atas pariwisata yang ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta membantu memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat jalinan persahabatan antar negara hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Pariwisata.⁸

Tabel 1.2.
Jumlah Obyek Wisata di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021.⁹

No.	Tahun	Jenis Obyek Daya Tarik Wisata			Jumlah Obyek Wisata (Unit)
		Alam	Budaya	Buatan	
1.	2019	350	82	175	607
2.	2020	350	82	175	623
3.	2021	325	98	184	680

Jumlah obyek wisata di Provinsi Jawa Barat terus meningkat. Seperti yang disampaikan oleh Dinas Kominfo Jawa Barat bahwa Jumlah obyek wisata tahun 2019 berjumlah 670 dan pada tahun 2020 berjumlah 623 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 50 wisata baru yang berupa 25 obyek wisata baru dengan jenis obyek daya tarik wisata berupa alam dan 16 obyek wisata baru dengan jenis obyek daya tarik wisata budaya kemudian 9 obyek wisata baru dengan jenis obyek daya tarik wisata buatan.

⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata.

⁹ Jawa Barat Dinas Kominfo, "Jumlah Tempat Rekreasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat," Government, last modified 2021, <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-tempat-rekreasi-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>.

Salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan daerah adalah dengan cara mengembangkan sektor-sektor potensial yang ada salah satunya adalah perubahan, ditambah lagi pada tahun 2019 Pandemi melanda Indonesia dan mengurangi jumlah wisatawan bahkan tidak sedikit obyek wisata yang mengalami kebangkrutan karena hal ini.

Tabel 1.3

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021.¹⁰

No	Tahun	Wisatawan		Jumlah
		Mancanegara	Domestik	
1	2019	3.645.433	64.610.832	68.256.265
2	2020	1.905.144	35.513.885	37.419.029
3	2021	219534	47132138	47351672

Masa pandemi dan berbagai kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitasnya diluar. Pada tahun ini 2022 ekonomi mencoba bangkit kembali termasuk sektor pariwisata sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui website Jabarprov.go.id bahwa terdapat 11 prioritas pembangunan di provinsi Jawa Barat dan pada point ke 11 yaitu pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi pemerintah provinsi Jawa Barat.¹¹

Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan dengan kondisi ekonomi, Jumlah Retribusi Obyek Wisata, Jumlah Pajak Restoran, Jumlah Pajak Akomodasi, Jumlah Pajak Usaha Perjalanan Wisata Wisata terhadap penerimaan Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor pendapatan

¹⁰ "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2021," *BPS Provinsi Jawa Barat*, 2021, 500, <https://jabar.bps.go.id>.

¹¹ Humas Jabar, "11 Prioritas Pembangunan Jabar Tahun 2022," Government, Last Modified," Government, last modified 2021, https://jabarprov.go.id/index.php/news/43533/11_Prioritas_Pembangunan_Jabar_Tahun_2022.

pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Barat selama pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam Tesis ini adalah “Pariwisata” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pariwisata selama pandemi yaitu pengaruh pariwisata terhadap pendapatan asli daerah selama pandemi Covid-19 (studi pada lingkup pemerintah provinsi Jawa Barat).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Data-data yang telah diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat diolah dan dianalisis dengan pengujian hipotesis

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian yang diangkat peneliti adalah berkaitan dengan studi pengaruh pariwisata terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat selama pandemi Covid-19.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar permasalahannya maka pembatasan masalah yaitu seputar pengaruh pariwisata terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat selama pandemi Covid-19.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari beberapa tahapan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Jumlah Retribusi Obyek Wisata memiliki pengaruh Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama pandemi Covid-19?
- b. Apakah Jumlah Wisatawan memiliki Pengaruh Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19?

- c. Apakah Jumlah Pajak Restoran memiliki Pengaruh Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19?
- d. Apakah Jumlah Pajak Akomodasi memiliki Pengaruh Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19?
- e. Apakah Jumlah Pajak Usaha Perjalanan Wisata memiliki Pengaruh Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh jumlah retribusi obyek wisata terhadap PAD sektor Pariwisata selama pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh dari Jumlah Wisatawan memiliki Pengaruh Terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh antara jumlah pajak restoran terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19.
4. Untuk menganalisis jumlah pajak akomodasi terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19.
5. Untuk menganalisis Jumlah Pajak Usaha Perjalanan Wisata wisata terhadap PAD Provinsi Jawa Barat selama Pandemi Covid-19.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ataupun kontribusi baik secara akademis, teoritis, maupun praktisi.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengambil tindakan dan keputusan terhadap pendapatan asli daerah selama pandemi Covid-19 melalui sektor pariwisata.
 - b. Menyumbangkan pemikiran bagi pihak pemerintah dan masyarakat serta para pengelola obyek wisata dalam membuat keputusan serta tindakan untuk mengembangkan sektor pariwisata.

- c. Sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan tentang pendapatan asli daerah selama pandemi Covid-19 melalui sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai ukuran keterkaitan antara sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah selama pandemi Covid-19.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan swasta maupun pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan pariwisata supaya pendapatan asli daerah terus mengalami penerimaan yang stabil.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, dandiharapkan dari hasil penelitian ini akan memberi kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya pada Program Studi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Paradigma Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis akan didapatkan sistematika penulisan menjadi lima bab.

Bab pertama pendahuluan yang memuat latar belakang masalah mengenai mengapa mengambil permasalahan tersebut sebagai obyek penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah yang terdiri dari dua rumusan masalah, identifikasi masalah, dua tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta hipotesis penelitian.

Bab kedua memuat landasan teori dan kajian pustaka mengenai teori pembangunan daerah, pendapatan asli daerah, pariwisata, variabel penelitian, kerangka pemikiran, dan literatur review (penelitian terdahulu) dan hhipotesis penelitian.

Bab ketiga berisi tentang metodologi penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran, dan analisis data.

Bab keempat berisi deskripsi hasil penelitian berupa analisis instrumen penelitian, analisis uji data regresi, uji hipotesis beserta pembahasannya.

Bab kelima memuat penutup yang menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.

